

LAPORAN KEUANGAN

TAHUNAN
AUDITED



2024

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LAPORAN KEUANGAN TA 2024

PERIODE 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER 2024

**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
PANGKALPINANG**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Pangkalpinang, 2 Mei 2025

Kepala,

Dedy Arief Hendriyanto. S.St,Pi,M.Si

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar | 1 |
| Daftar Isi | 2 |
| Pernyataan Tanggung Jawab | 3 |
| Ringkasan | |
| I. Laporan Realisasi Anggaran | 6 |
| II. Neraca | 7 |
| III. Laporan Operasional | 8 |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas | 9 |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan | |
| A. Penjelasan Umum | 11 |
| B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran | 22 |
| C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca | 30 |
| D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional | 40 |
| E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas | 47 |
| F. Pengungkapan Penting Lainnya | 52 |
| VI. Lampiran dan Daftar | |

**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG**
JL. PROFESI NOMOR 4, PANGKALPINANG33149
TELEPON (0717) 434756, FAXIMILE (0717) 426434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 2 Mei 2025

Kepala,



Dedy Arief Hendriyanto. S.St,Pi,M.Si

NIP 197805252000031002

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 354.355.000,- atau mencapai 71% persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 500.000.000. Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.758.940.592,- atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar Rp. 5.836.936.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 6.469.554.586,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 73.355.730,- Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Piutang jangka pendek sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 6.396.198.856,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 61.180.000,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 6.469.554.586,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 354.355.000,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.6.103.616.722,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (5.749.261,-).

Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 5.749.261.722,- dan Rp.-. Sehingga Nilai Defisit LO Sebesar Rp. 5.749.261.722,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 12.635.457.565- dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. (5.749.261.722,-) dikurangi dengan Koreksi yang mengurangi ekuitas ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 433.403.149,- Kenaikan/Penurunan Ekuitas Rp.6.182.664.871,- sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 6.452.792.694.,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN PANGKALPINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024***(Dalam Rupiah)*

| Uraian | Catatan | TA 2024 | | % thd Angga ran | TA 2023 |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| Pendapatan | | | | | |
| <i>Penerimaan Negara Bukan Pajak</i> | <i>B.1</i> | <i>500.000.000,-</i> | <i>354.355.000,-</i> | <i>71</i> | <i>603.202.000,-</i> |
| Belanja | <i>B.2</i> | | | | |
| <i>Belanja Pegawai</i> | <i>B.3</i> | <i>3.068.504.000,</i> | <i>3.065.940.592,</i> | <i>100</i> | <i>3.617.377.608.</i> |
| <i>Belanja Barang</i> | <i>B.4</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>97</i> | <i>-</i> |
| <i>Belanja Modal</i> | <i>B.5</i> | <i>2.768.432.000,</i> | <i>2.693.361.905,</i> | <i>-</i> | <i>3.405.336.179,</i> |
| <i>Belanja Batuan Sosial</i> | <i>B.6</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | | <i>-</i> |
| | | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>318.145.960</i> |
| | | <i>-</i> | <i>-</i> | | |
| Jumlah Belanja | | 5.836.936.000, | 5.758.940.592, | 99 | 7.340.859.767, |
| | | <i>-</i> | <i>-</i> | | <i>-</i> |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN PANGKALPINANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 31-Dec-24 | 31-Dec-23 |
|--|---------|----------------------|-----------------------|
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | C.1 | 0 | 0 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | C.2 | 0 | 0 |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | C.3 | | |
| Piutang Bukan Pajak | C.4 | | - |
| Bagian Lancar TP/TGR | C.5 | | - |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | C.6 | | - |
| Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar | C.7 | | - |
| Belanja Dibayar di Muka | C.8 | 0 | 0 |
| Pendapatan yang Masih harus Diterima | C.9 | | - |
| Persediaan | C.10 | 73.355.730,- | 114.709.438 |
| Persediaan yang Belum Diregister | | | |
| Jumlah Aset Lancar | | 73.355.730,- | 114.709.438 |
| PIUTANG JANGKA PANJANG | | | |
| Tagihan TP/TGR | C.11 | - | - |
| Tagihan Penjualan Angsuran | C.12 | - | - |
| Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang | C.13 | - | - |
| Jumlah Piutang Jangka Panjang | | | |
| ASET TETAP | | | |
| Tanah | C.14 | 643.068.788 | 3.232.044.788 |
| Peralatan dan Mesin | C.15 | 5.674.833.996 | 6.636.197.391 |
| Gedung dan Bangunan | C.16 | 5.418.737.430 | 9.098.990.849 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | C.17 | 1.214.487.100 | 1.271.402.750 |
| Aset Tetap Lainnya | C.18 | 61.180.000 | 61.180.000 |
| Konstruksi dalam pengerjaan | C.19 | | - |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | C.20 | 6.616.108.458 | -7.755.875.386 |
| Jumlah Aset Tetap | | 6.396.198.856 | 12.543.940.392 |
| ASET LAINNYA | | | |
| Aset Tidak Berwujud | C.21 | - | - |
| Aset Lain-Lain | C.22 | - | - |
| Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya | C.23 | - | - |
| Jumlah Aset Lainnya | | | |
| JUMLAH ASET | | 6.496.554.587 | 12.658.649.830 |
| KEWAJIBAN | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | |
| Uang Muka dari KPPN | C.24 | 0 | 0 |
| Utang kepada Pihak Ketiga | C.25 | 16.761.892 | 23.192.265 |
| Utang yang belum ditagihkan | C.26 | | |
| Hibah Langsung yang Belum Disahkan | C.27 | | |
| Utang Jangka Pendek lainnya | | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | 16.761.892 | 23.192.265 |
| EKUITAS | | | |
| Ekuitas | C.28 | 6.452.792.694 | 12.635.457.565 |
| JUMLAH EKUITAS | | 6.452.792.694 | 12.635.457.565 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 6.469.554.586 | 12.658.649.830 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 31-Dec-24 | 31-Dec-23 |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | |
| PENDAPATAN | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | D.1 | 354.355.000 | 591.615.000 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 354.355.000 | 591.615.000 |
| BEBAN | | | |
| Beban Pegawai | D.2 | 3.065.578.687 | 3.617.377.608 |
| Beban Persediaan | D.3 | 124.934.108 | 319.782.509 |
| Beban Barang dan Jasa | D.4 | 1.850.911.279 | 2.087.584.304 |
| Beban Pemeliharaan | D.5 | 335.729.102 | 380.238.299 |
| Beban Perjalanan Dinas | D.6 | 426.380.751 | 615.406.606 |
| Beban Barang untuk Diserahkan kepada | D.7 | 0 | 0 |
| Beban Bantuan Sosial | D.8 | | |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D.9 | 300.082.795 | 679.512.653 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | D.10 | | - |
| JUMLAH BEBAN | | 6.103.616.722 | 7.699.901.979 |
| SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL | | | -7.108.286.979 |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | D.11 | | |
| Surplus Penjualan Aset Nonlancar | | | 9667853 |
| Jumlah surplus/ (defisit) pelepasan aset Non lancar | | | |
| Defisit Penjualan Aset Non Lancar | | | |
| Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | | |
| Jumlah beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | | |
| SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | 9667853 |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | | 5.749.261.722 | 7.098.619.126 |
| POS LUAR BIASA | D.12 | | |
| Pendapatan PNB | | | - |
| Beban Perjalanan Dinas | | | - |
| SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA | | 5.749.261.722 | - |
| SURPLUS/DEFISIT LO | | 5.749.261.722 | 7.098.619.126 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN PANGKALPINANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024***(Dalam Rupiah)*

| URAIAN | CATATAN | Dec-24 | 2023 |
|---|---------|----------------------|-----------------------|
| EKUITAS AWAL | E.1 | 12.635.457.565 | 12.975.847.174 |
| SURPLUS/DEFISIT LO | E.2 | 5.749.261.722 | -7.098.619.126 |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | E.3 | | |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN | | | - |
| KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | E.3.1 | | - |
| PENYESUAIAN NILAI ASET | E.3.2 | | - |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | E.3.3 | | - |
| SELISIH REVALUASI ASET TETAP | E.3.4 | | - |
| KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVAL | E.3.5 | | - |
| KOREKSI LAIN-LAIN | E.3.6 | | - |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | | 433.403.149 | 6.758.229.517 |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | E.4 | 6.182.664.871 | 340.389.609 |
| EKUITAS AKHIR | E.5 | 6.452.792.694 | 12.635.457.565 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun KIPM Pangkalpinang

| | |
|--|--|
| <i>Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis</i> | <p>Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang Merupakan salah satu UPT dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berada didaerah yang terletak di Komplek Perkantoran Kep.Bangka Belitung Jln Profesi No. 4 Pangkalpinang 33149 dan membawahi 2 Wilayah Kerja yaitu Wilayah Kerja Belitung dan Muntok yang melaksanakan tindakan perkarantinaan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka mencapai tujuan karantina yang diamanatkan UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 untuk mensukseskan pembangunan Kelautan dan Perikanan di daerah Provinsi Bangka Belitung dan Nasional pada umumnya memerukan pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat terarah sesuai tujuan dan target serta berkesinambungan.</p> <p>Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Nomor : KEP.118/BKIPM/2012 tentang Rencana Strategis BKIPM Tahun 2012-2014, Kebijakan strategis BKIPM KKP adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis <i>scientific barrier</i> sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan. |
|--|--|

- SKIPM Pangkalpinang sebagai satuan kerja BKIPM dituntut untuk mampu meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman dikonsumsi manusia. Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam *“Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitary Measure”* (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi *Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement* merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*)/hambatan non tariff (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangan system jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global.

Dengan demikian peran BKIPM sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

A.3. Basis Akuntansi

Akuntansi

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
-LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

Pendapatan

(2) Pendapatan- LO

-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- **Aset Lancar**
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|--|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100% |
| | 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

a. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

b. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|---|---------------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (tahun) |
|---|-----------------------------|
| Software Komputer | 4 |
| Franchise | 5 |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | 10 |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim. | 20 |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | 25 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram. | 50 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I | 70 |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak

Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

B.1 Pendapatan

Pendapatan

Rp.

354.355.000

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 354.355.000,- atau mencapai 71 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.500.000.000. Pendapatan Kantor SKIPM Pangkalpinang terdiri dari Pendapatan Jasa (Jasa karantina) dan Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya, Pendapatan Jasa Karantina Perikanan serta Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

| Uraian | Anggaran | Realisasi | % Real Angg. |
|---|--------------------|--------------------|--------------|
| Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya | 500.000.000 | 354.255.000 | 70,85 |
| Pendapatan Jasa Karantina Perikanan | - | 100.000 | |
| Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin | - | - | - |
| Jumlah | 500.000.000 | 354.355.000 | 70,87 |

Realisasi Pendapatan Jasa per 31 Desember 2024

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2024

| URAIAN | Realisasi 31 Desember 2024 | REALISASI 31 Desember 2023 | NAIK (TURUN) % |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Pendapatan Jasa | 0 | 0 | - |
| Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Lalu | 0 | 0 | - |
| Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya | 354.355.000 | 603.202.000 | 40,00 |
| Jumlah | 354.355.000 | 603.202.000 | 58,75 |

Realisasi

B.2 Belanja

Belanja Negara
Rp.
5.758.940.592

Realisasi Belanja instansi pada per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 5.758.940.592,- atau 99% dari anggaran belanja sebesar Rp. 5.836.936.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

| Uraian | 2024 | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | % Real Angg. |
| Belanja Pegawai | 3.068.504.000 | 3.065.578.687 | 99,90 |
| Belanja Barang | 2.768.432.000 | 2.693.361.905 | 97,29 |
| Belanja Modal | - | - | - |
| Belanja Bantuan Sosial | - | - | - |
| Total Belanja Kotor | 5.836.936.000 | 5.758.940.592 | 98,66 |
| Pengembalian | - | - | - |
| Jumlah | 5.836.936.000 | 5.758.940.592 | 98,66 |

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023

| URAIAN | REALISASI 31 Desember 2024 | REALISASI 31 Desember 2023 | NAIK (TURUN) % |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Belanja Pegawai | 3.065.578.687 | 3.617.377.608 | (15,25) |
| Belanja Barang | 2.693.361.905 | 3.405.336.179 | (20,91) |
| Belanja Modal | - | 318.145.980 | (100,00) |
| Belanja Bantuan Sosial | - | - | - |
| Jumlah | 5.758.940.592 | 7.340.859.767 | (21,55) |

Belanja

B.3 Belanja Pegawai

Pegawai Rp.
3.065.578.687

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 3.065.578.687,- dan Rp 3.617.377.608,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 1.358.714.444 | 1.783.164.106 | 31,24 |
| Pengembalian tunjangan fungsional | 0 | 0 | - |
| Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS | 92.641.867 | 61.991.512 | (33,08) |
| Belanja Honorarium | 74.888.000 | 0 | - |
| Belanja lembur / makan | 79.612.000 | 128.292.000 | 61,15 |
| Pengembalian belanja lembur | 0 | 0 | - |
| Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) | 1.459.722.376 | 1.643.929.990 | 12,62 |
| Jumlah Belanja Kotor | 3.065.578.687 | 3.617.377.608 | 18,00 |
| Pengembalian Belanja Pegawai | | - | - |

Belanja
Barang Rp.
3.405.336.179

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.405.336.179 dan Rp. 3.217.960.857.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

| Nama Barang | REALISASI DESEMBER 2024 | REALISASI TA 2023 | NAIK (TURUN) % |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Belanja Barang Operasional | 1.005.663.144 | 933.821.278 | 7,69 |
| Belanja Barang Non Operasional | 85.796.000 | 87.378.000 | (1,81) |
| Belanja Jasa | 996.367.375 | 1.162.928.243 | (14,32) |
| Belanja Pemeliharaan | 377.664.299 | 374.177.639 | 0,93 |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 615.406.606 | 370.553.957 | 66,08 |
| Belanja Barang Persediaan | 324.438.755 | 289.101.740 | 12,22 |
| Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy. | - | - | - |
| Jumlah Belanja Kotor | 3.405.336.179 | 3.217.960.857 | 5,82 |
| Pengembalian Belanja | - | - | - |

Belanja
Modal Rp
318.145.980

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 318.145.980 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

| URAIAN | REALISASI TA 2024 | REALISASI T.A 2023 | NAIK (TURUN) % |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Belanja Modal Tanah | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Lainnya | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja Kotor | | 0 | 0,00 |
| Pengembalian | | - | - |
| Jumlah Belanja | 0 | 0 | 0,00 |

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Belanja
Bantuan
Sosial Rp.0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan TA 2023. Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan banyaknya daerah miskin.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023*

| URAIAN | REALISASI T.A 2024 | REALISASI T.A 2023 | NAIK (TURUN) % |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| - | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal BLU | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0 | 0 | 0,00 |

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.0-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan 2023

| Keterangan | 31-Dec | Dec-23 |
|---------------------------------|--------|--------|
| Uang Tunai | | - |
| Bank BRI No.acc 006301000914302 | | - |
| Jumlah | | - |

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp.0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Penerimaan PNBPN langsung disetor ke dalam kas negara tanpa melalui Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp.0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0,- Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2024 dan 2023

| Keterangan | TH 2024 | TH 2023 |
|--|---------|---------|
| Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | | - |
| Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan | | - |
| Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan | | - |
| Jumlah | | - |

Piutang PNBP
Rp.0

4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp,0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP TA 2024 dan 2023

| Uraian | 2024 | 2023 |
|-----------------|------|------|
| Piutang PNBP | - | - |
| Piutang Lainnya | - | - |
| Jumlah | - | - |

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp.0,-

**5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0.- dan Rp.0,- Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023

| No | Nama | TH 2024 | TH 2023 |
|--------|------|---------|---------|
| 1 | | - | - |
| 2 | | - | - |
| 3 | | - | - |
| 4 | | - | - |
| 5 | | - | - |
| 6 | | - | - |
| Jumlah | | - | - |

Bagian Lancar
TPA
Rp.0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2024 dan 2022

| No | Nama | TH 2024 | TH 2023 |
|--------|------|---------|---------|
| 1 | | | - |
| 2 | | | - |
| 3 | | | - |
| 4 | | | - |
| 5 | | | - |
| Jumlah | | | - |

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp.0.

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0,- Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
TA 2024 dan 2023*

| Kualitas Piutang | Nilai Piutang Jk Pendek | % Penyisihan | Nilai Penyisihan |
|---|-------------------------|--------------|------------------|
| Piutang Bukan Pajak | | | |
| Lancar | - | 0,00% | - |
| Kurang Lancar | - | 0% | - |
| Diragukan | - | 0% | - |
| Macet | - | 0% | - |
| Jumlah | - | | - |
| Bagian Lancar TP/TGR | | | |
| Lancar | - | 0,00% | - |
| Kurang Lancar | - | 0% | - |
| Diragukan | - | 0% | - |
| Macet | - | 0% | - |
| Jumlah | - | | - |
| Bagian Lancar TPA | | | |
| Lancar | - | 0,00% | - |
| Kurang Lancar | - | 0% | - |
| Diragukan | - | 0% | - |
| Macet | - | 0% | - |
| Jumlah | - | | - |
| Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih | - | | - |

Belanja Dibayar di Muka Rp.0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2024 dan 2023

| Jenis | TH 2024 | TH 2023 |
|-------------------------------|---------|---------|
| Pembayaran Internet | - | - |
| Pembayaran Listrik | - | - |
| Pembayaran Telpon dan Fax | - | - |
| Pembayaran pengiriman Dokumen | - | - |
| Jumlah | - | - |

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp.0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian

Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2024 dan 2023

| Jenis | TH 2023 | TH 2022 |
|--------------------------------------|---------|----------|
| Pendapatan Jasa Pelatihan | | - |
| Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan | | - |
| Jumlah | | - |

Persediaan Rp
73.355.730

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 73.355.730 dan Rp. 114.709.438 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

| Jenis | 31/12/2024 | 31-Dec-23 |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| Barang Konsumsi | 73.355.730 | 114709438 |
| Barang untuk Pemeliharaan | - | - |
| Suku Cadang | - | - |
| Bahan Baku | - | - |
| Jumlah | 73355730 | 114709438 |

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR
Rp.0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau

tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2024 dan 2023

| No | Debitur | TH 2023 | TH 2022 |
|---------------|---------|---------|---------|
| 1 | | | - |
| 2 | | | - |
| 3 | | | - |
| 6 | | | - |
| Jumlah | | | - |

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp.0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2024 dan 2023

| No | Debitur | TH 2024 | TH 2023 |
|---------------|---------|---------|---------|
| 1 | | - | |
| 2 | | - | - |
| 3 | | - | - |
| 4 | | - | - |
| 5 | | - | - |
| Jumlah | | - | - |

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp.0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 . Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas

ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2024

| Kualitas Piutang | Nilai Piutang Jk Panjang | % Penyisihan | Nilai Penyisihan |
|---|--------------------------|--------------|------------------|
| Tagihan TP/TGR | | | |
| Lancar | - | 0,00% | - |
| Kurang Lancar | - | 0% | - |
| Diragukan | - | 0% | - |
| Macet | - | 0% | - |
| Jumlah | - | | - |
| Tagihan PA | | | |
| Lancar | - | 0,00% | - |
| Kurang Lancar | - | 0% | - |
| Diragukan | - | 0% | - |
| Macet | - | 0% | - |
| Jumlah | - | | - |
| Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih | - | | - |

Tanah Rp.
643.068.788

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang 31Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 643.068.788,- dan Rp.3.232.044.788 ,-.

| | |
|---|--------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 | 643.068.788 |
| Mutasi tambah: | |
| Pembelian | 0 |
| Mutasi kurang: | |
| Revaluasi aset | - |
| Penyitaan pengadilan | - |
| Saldo per 31 Desember 2024 | 643.068.788 |

Peralatan dan
Mesin Rp.
5.674.833.996

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp 5.674.833.996 dan Rp. 6.636.197.391. Mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 | |
|---|----------------------|
| Mutasi tambah: | |
| Pembelian | |
| Hibah Barang | 0 |
| Transfer Masuk | |
| Koreksi tambah | 0 |
| Mutasi kurang: | 0 |
| Penghentian dari penggunaan | - |
| Saldo per 31 Desember 2024 | 5.674.833.996 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023 | |
| Nilai Buku per 31 Desember 2024 | 5.674.833.996 |

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan
Bangunan
Rp.
5.418.737.430

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.5.418.737.430 dan Rp. 9.098.990.849. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang pada gedung dan bangunan.

| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 | |
|--|----------------------|
| Mutasi tambah: | |
| Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan | 0 |
| Perjalanan Dinas Pembangunan Gedung dan Bangunan | 0 |
| Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan | 0 |
| Mutasi kurang: | - |
| Saldo per 31 Desember 2024 | 5.418.737.430 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023 | |
| Nilai Buku per 31 Desember 2023 | 5.418.737.430 |

Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp1.214.487.100

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.214.487.100 dan Rp. Rp.1.271.402.750 Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| | |
|---|----------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 | - |
| Mutasi tambah: | |
| Penambahan jaringan teknologi informasi | - |
| Mutasi kurang: | - |
| Saldo per 31 Desember 2024 | 1.214.487.100 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023 | |
| Nilai Buku per 30 September 2024 | 1.214.487.100 |

Aset Tetap
Lainnya
Rp.61.180.000

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.61.180.000 dan Rp.61.180.000. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

| | |
|---|-------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 | 0 |
| Mutasi tambah: | |
| - | 0 |
| Mutasi kurang: | |
| - | 0 |
| Saldo per 31 Desember 2024 | 61.180.000 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024 | 0 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2024 | 61.180.000 |

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp.
6.616.108.458

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp. 6.616.108.458 dan Rp 07.755.875.386 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang

bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Aset Tak

C.21 Aset Tak Berwujud

Berwujud Rp.0

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 | - |
| Mutasi tambah: | |
| Pembelian | - |
| Mutasi kurang: | - |
| Saldo per 31 Desember 2024 | - |
| Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024 | - |
| Nilai Buku per 31 Desember 2024 | - |

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2024

| Uraian | Nilai Perolehan |
|---------------|-----------------|
| | 0 |
| | 0 |
| Jumlah | 0 |

Aset Lain-Lain
Rp.0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah dan Rp.0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

| | |
|--|---|
| Saldo per 31 Desember 2024 | - |
| Mutasi tambah: | |
| - reklasifikasi dari aset tetap | - |
| Mutasi kurang: | |
| - penggunaan kembali BMN yang dihentikan | - |
| - penghapusan BMN | - |
| Saldo per 31 Desember 2024 | - |
| Akumulasi Penyusutan | - |
| Nilai Buku per 31 Desember 2024 | - |

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp.0

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp.0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

| Aset Tetap | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi | Nilai Buku |
|-------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| Aset Tak Berwujud | | | |
| Software | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 |
| Aset Lain-lain | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 |

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari
KPPN Rp.0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2024 Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjaan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp. 16.761.892

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp 16.761.892,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang kepada pihak ketiga berupa tagihan listrik sebesar Rp 14.981.261,- tagihan telepon sebesar Rp.0, tagihan Surat dinas Pos sebesar Rp. 119.700,- dan Tagihan Internet sebesar Rp. 1.660.931,-.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

| Uraian | Jumlah |
|---------------------|-------------------|
| Listrik | 14.981.261 |
| Internet | 1.660.931 |
| Tagihan Surat Dinas | 119.700 |
| Total | 16.761.892 |

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp.0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian | Jumlah |
|--------------|----------|
| | - |
| | - |
| | - |
| Total | - |

Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp.0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
TA 2024 dan TA 2023*

| Uraian | TH 2024 | TH 2023 |
|--|----------|----------|
| Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar | - | - |
| Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar | - | - |
| Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar | - | - |
| Jumlah | - | - |

Ekuitas
Rp.
6.469.554.586

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 6.469.554.586 dan Rp.12.658.649.830,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP
Rp.354.355.000

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 354.355.000,- dan Rp.591.615.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 204 2 dan 2023

| URAIAN | TH 2024 | TH 2023 |
|---|------------------|--------------------|
| Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin | 0 | 0 |
| Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi | 354255000 | 603.202.000 |
| Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Tahun Lalu | | 0 |
| Pendapatan jasa Karantina Perikanan | 100000 | 0 |
| Jumlah | 354355000 | 603.202.000 |

Beban Pegawai
Rp.
3.065.578.687

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.065.578.687 dan Rp. 3.617.377.608 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal..

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023

| URAIAN | TH 2024 | TH 2023 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Beban Gaji | 1088374675 | 1270412218 |
| Beban Tunjangan-tunjangan | 1741565012 | 801383040 |
| Beban Uang makan | 156027000 | 245115000 |
| Beban Uang Lembur | 79612000 | 128292000 |
| Jumlah | 3065578687 | 2445202258 |

Beban
Persediaan Rp.
124.934.108

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 124.934.108 dan 319.782.509. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

| URAIAN | TH 2024 | TH 2023 |
|---|------------------|--------------------|
| Beban Persediaan Konsumsi | 124.934.108 | 319.782.509 |
| Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan | 4927000 | |
| Beban persediaan suku cadang | | |
| Beban Persediaan Lainnya | | |
| Beban persediaan bahan baku | | 135.306.584 |
| Beban Persediaan Rusak/ Usang | | - |
| Jumlah | 129861108 | 455.089.093 |

Beban Barang
dan Jasa Rp.
1.850.911.279

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.850.911.279 dan Rp. 2.087.584.304. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

| URAIAN JENIS BEBAN | TH 2024 | TH 2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| Beban Keperluan Perkantoran | 561844307 | 707104177 |
| Beban Penambah Daya Tahan Tubuh | 47520000 | 114048000 |
| Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 8228651 | 6336667 |
| Beban Honor Operasional Satker | 69992000 | 118008000 |
| Beban Barang Operasional Lainnya | 35062900 | 52092400 |
| Beban Barang operasional - Penanganan Pandemi COVID 19 | | |
| Beban Bahan | 28513600 | 41136000 |
| Beban Honor Output Kegiatan | 4896000 | 8160000 |
| Beban Barang Non Operasional Lainnya | | 36500000 |
| Beban Langganan Listrik | 220089600 | 201184987 |
| Beban Langganan Telpon | 96121 | 521808 |
| Beban Langganan Air | | |
| Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya | | |
| Beban sewa | 43665000 | 39750000 |
| Beban Jasa Profesi | 3600000 | |
| Beban Jasa Lainnya | 827403100 | 739550000 |
| Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID 19 | | |
| Jumlah | 1850911279 | 2064392039 |

Beban
Pemeliharaan
Rp. 335.729.102

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 335.729.102 dan Rp.380.238.299,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2024

| URAIAN JENIS BEBAN | TH 2024 | TH 2023 |
|--|------------------|------------------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 179104306 | 209380849 |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 151697796 | 168283450 |
| Beban bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) | | |
| Beban pemeliharaan Jaringan | | |
| Beban Persediaan bahan utk pemeliharaan | 4927000 | 2145000 |
| Beban Persediaan suku cadang | | 239000 |
| Jumlah | 335729102 | 380048299 |

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 426.380.751 dan Rp 615.406.606. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas Rp. 426.380.751

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA2024 dan 2023

| URAIAN JENIS BEBAN | TH 2024 | TH 2023 |
|---|------------------|------------------|
| Beban Perjalanan Biasa | 369915576 | 504137814 |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17510000 | |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 18000000 | 38010000 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 20955175 | 73258792 |
| Jumlah | 426380751 | 615406606 |

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp.0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2018. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
TA 2024 dan 2023*

| URAIAN JENIS BEBAN | TH 2024 | TH 2023 |
|--|---------|---------|
| Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | | |
| Beban Persediaan pita, cukai, materai dan legas | | |
| Jumlah | | |

Beban Bantuan
Sosial Rp.0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

| URAIAN JENIS BEBAN | 2024 | 2023 | TH 2021 |
|--|------|----------|----------|
| Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial | | 0 | 0 |
| Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial | | 0 | 0 |
| Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial | | 0 | 0 |
| Jumlah | | 0 | 0 |

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 300.082.795

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 300.082.795 Rp 679.512.653 Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2024 dan 2023*

| URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | 31-Dec-24 | 31-Dec-23 | NAIK (TURUN) % |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 154.552.044 | 223.112.210 | (31) |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 96.983.857 | 96.983.857 | - |
| Beban penyusutan Jalan dan Jembatan | 41.317.688 | 41.317.688 | - |
| Beban Penyusutan Irigasi | 5.983.243 | 5.983.243 | - |
| Beban Penyusutan Jaringan | 1.245.963 | 1.245.963 | - |
| Beban Penyusutan Aset tetap yg tidak di gunakan pemerintah | | | - |
| Jumlah Penyusutan | 300.082.795 | 368.642.961 | (19) |
| | | | - |
| Beban Penyisihan Piutang tak tertagih | - | - | - |
| Beban Transfer | - | - | - |
| Beban lain-lain | - | - | - |
| Amortisasi | 300.082.795 | 368.642.961 | (19) |

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

TA 2024 dan 2023

| URAIAN JENIS BEBAN | 31-Dec-24 | 31-Dec-23 |
|--|-----------|-----------|
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar | 0 | 0 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar | 0 | 0 |
| Jumlah | | 0 |

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.0,-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023

| URAIAN | TH 2024 | TH 2023 | NAIK (TURUN) % |
|--|----------|----------|----------------------|
| Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0,00 |
| Beban Kerugian Pelepasan Aset | 0 | 0 | 0,00 |
| Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *) | 0 | 0 | 0,00 |
| Penerimaan kembali belanja pegawai tahun lalu | 0 | 0 | 0,00 |
| Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *) | 0 | 0 | 0,00 |
| Beban Persediaan Rusak/Usang *) | 0 | 0 | 0,00 |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional | 0 | 0 | 0,00 |

*)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa
Rp.0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2024 dan 2023

| URAIAN | TH 2024 | TH 2023 |
|------------------------|----------|----------|
| Pendapatan PNB | 0 | 0 |
| Beban Perjalanan Dinas | 0 | 0 |
| Beban Persediaan | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 |

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp. 12.635.457.565 **E.1 Ekuitas Awal**
 Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.635.457.565 dan Rp. 12.975.847.174.

Defisit LO Rp (5.732.499.830) **E.2 Surplus (Defisit) LO**
 Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp (5.732.499.830) dan Rp (6.737.393.073). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp.0 **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**
 Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp.0 **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**
 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah

masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

| Jenis Persediaan | Koreksi |
|--------------------------|----------|
| Koreksi nilai persediaan | - |
| Suku Cadang | - |
| Jumlah | - |

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp.0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp.0

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0 dan Rp.0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2024

| Jenis Aset Tetap | Nilai Koreksi |
|----------------------|---------------|
| Revaluasi aset tetap | - |
| Tanah | - |
| Gedung dan Bangunan | - |
| Jumlah | - |

Koreksi Lain-Lain Rp.0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

| Jenis Beban | Jumlah Koreksi |
|--------------------|----------------|
| Koreksi Beban | - |
| Koreksi Pendapatan | - |
| Koreksi Piutang | - |
| Koreksi Kewajiban | - |
| Koreksi Hibah | - |
| Jumlah | - |

Transaksi Antar
Entitas Rp.
433.403.149,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 433.403.149 dan Rp 6.758.229.517. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp.sedangkan DKEL sebesar Rp.0.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 0 terdiri dari:

| No | Jenis | Entitas Asal | Nilai |
|----|----------------------------------|-------------------|-----------|
| 1 | sertifikat kesehatan HC (Kode D) | Sekretariat BKIPM | - |
| 2 | sertifikat kesehatan HC (KI-D12) | Sekretariat BKIPM | - |
| 3 | sertifikat kesehatan HC (KI-D1) | Sekretariat BKIPM | 4.114.000 |

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BABUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0. dari total Rp0,- .

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| No | Pemberi Hibah | Bentuk Hibah | Nilai Hibah |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|
| 1 | Pemerintah Kabupaten Belitung | Tanah | |
| 2 | Pemerintah Provinsi Bangka Belitung | Tanah | |
| Total Pengesahan | | | |
| Pengesahan Pengembalian Hibah | | | Rp - |
| Jumlah | | | Rp - |

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2024 disajikan pada lampiran.

Ekuitas Akhir Rp.
6.452.792.694

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 6.452.792.694,- dan Rp.12.635.457.565,-

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Penjelasan Anggaran Prioritas Nasional (PN) TA 2024

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang. Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dengan Kode 01 dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP, dengan Rincian Pagu Rp. 111.500.000,- dan realisasi Rp. 98.624.395,- atau 90.64%

Tabel Penjelasan terkait Anggaran Prioritas Nasional TA 2024

| Kode | Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % | Satuan Rincian Output | Target | Capaian Rincian Output | % |
|---------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------|------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3989.PDC.001 | Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI | 29.500.000 | 26.845.892 | 91% | Produk | 70 | 70 | 100% |
| 3989.QIC.001 | Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability | 12.000.000 | 11.349.263 | 94.58% | Rekomendasi Kebijakan | 2 | 2 | 100% |
| 3989.QIC.002 | UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | 70.000.000 | 60.429.240 | 86.33% | Lembaga | 10 | 10 | 100% |
| Jumlah | | 111.500.000 | 98.624.395 | 90.64% | | | | |

DAFTAR LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN TA 2024

PERIODE 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER 2024

**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
PANGKALPINANG**



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 649699
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

| No | Jenis Rekon | Nilai SPAN | Nilai SAKTI | Selisih |
|----|--|---------------|---------------|---------|
| 1 | Pagu Belanja | 5,836,936,000 | 5,836,936,000 | 0 |
| 2 | Belanja | 5,758,940,872 | 5,758,940,872 | 0 |
| 3 | Pengembalian Belanja | -280 | -280 | 0 |
| 4 | Estimasi Pendapatan | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| 5 | Pendapatan Bukan Pajak | 354,355,000 | 354,355,000 | 0 |
| 6 | Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pengembalian Pajak | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mutasi Uang Persediaan | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kas pada Badan Layanan Umum | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kas Lainnya di K/L dari Hibah | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga | 0 | 0 | 0 |

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JAN-25



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (649699) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG

Tgl Data : 16/01/25 12:43 PM

Tgl Cetak : 16/01/25 6:16 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

| NAMA PERKIRAAN | JUMLAH | | Kenaikan (Penurunan) | |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| | 2024 | 2023 | Jumlah | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ASET | | | | |
| ASET LANCAR | | | | |
| Persediaan | 73,355,730 | 114,709,438 | (41,353,708) | (36.05) |
| JUMLAH ASET LANCAR | 73,355,730 | 114,709,438 | (41,353,708) | (36.05) |
| ASET TETAP | | | | |
| Tanah | 643,068,788 | 3,232,044,788 | (2,588,976,000) | (80.10) |
| Peralatan dan Mesin | 5,674,833,996 | 6,636,197,391 | (961,363,395) | (14.49) |
| Gedung dan Bangunan | 5,418,737,430 | 9,098,990,849 | (3,680,253,419) | (40.45) |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1,214,487,100 | 1,271,402,750 | (56,915,650) | (4.48) |
| Aset Tetap Lainnya | 61,180,000 | 61,180,000 | 0 | 0.00 |
| AKUMULASI PENYUSUTAN | (6,616,108,458) | (7,755,875,386) | 1,139,766,928 | (14.70) |
| JUMLAH ASET TETAP | 6,396,198,856 | 12,543,940,392 | (6,147,741,536) | (49.01) |
| JUMLAH ASET | 6,469,554,586 | 12,658,649,830 | (6,189,095,244) | (48.89) |
| KEWAJIBAN | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | 16,761,892 | 23,192,265 | (6,430,373) | (27.73) |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 16,761,892 | 23,192,265 | (6,430,373) | (27.73) |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 16,761,892 | 23,192,265 | (6,430,373) | (27.73) |
| EKUITAS | | | | |
| EKUITAS | | | | |
| Ekuitas | 6,452,792,694 | 12,635,457,565 | (6,182,664,871) | (48.93) |
| JUMLAH EKUITAS | 6,452,792,694 | 12,635,457,565 | (6,182,664,871) | (48.93) |
| JUMLAH EKUITAS | 6,452,792,694 | 12,635,457,565 | (6,182,664,871) | (48.93) |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 6,469,554,586 | 12,658,649,830 | (6,189,095,244) | (48.89) |

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Pangkalpinang, 16 Januari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Ketua Pengguna Anggaran



DEDY ARJEE HENDRIYANTO, S.ST.PI, M.SI

197805252000031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (649699) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG

Tgl Data : 16/01/25 12:53 PM

Tgl Cetak : 16/01/25 6:27 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN | DEBET | KREDIT |
|----------|-----------|---|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0.0 | 117111 | Barang Konsumsi | 73,355,730 | 0 |
| 0.0 | 131111 | Tanah | 643,068,788 | 0 |
| 0.0 | 132111 | Peralatan dan Mesin | 5,674,833,996 | 0 |
| 0.0 | 133111 | Gedung dan Bangunan | 5,418,737,430 | 0 |
| 0.0 | 134111 | Jalan dan Jembatan | 769,438,100 | 0 |
| 0.0 | 134112 | Irigasi | 345,372,000 | 0 |
| 0.0 | 134113 | Jaringan | 99,677,000 | 0 |
| 0.0 | 135121 | Aset Tetap Lainnya | 61,180,000 | 0 |
| 0.0 | 137111 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0 | 5,084,355,825 |
| 0.0 | 137211 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0 | 808,436,638 |
| 0.0 | 137311 | Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan | 0 | 615,550,480 |
| 0.0 | 137312 | Akumulasi Penyusutan Irigasi | 0 | 86,584,152 |
| 0.0 | 137313 | Akumulasi Penyusutan Jaringan | 0 | 21,181,363 |
| 0.0 | 212112 | Belanja barang yang masih harus dibayar | 0 | 16,761,892 |
| 0.0 | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain | 0 | 5,758,940,592 |
| 0.0 | 313121 | Diterima dari Entitas Lain | 354,355,000 | 0 |
| 0.0 | 313211 | Transfer Keluar | 5,847,658,741 | 0 |
| 0.0 | 313221 | Transfer Masuk | 0 | 9,670,000 |
| 0.0 | 391111 | Ekuitas | 0 | 12,635,457,565 |
| 3.0 | 425289 | Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya | 0 | 354,255,000 |
| 3.0 | 425332 | Pendapatan Jasa Karantina Perikanan | 0 | 100,000 |
| 3.0 | 511111 | Beban Gaji Pokok PNS | 1,009,583,200 | 0 |
| 3.0 | 511119 | Beban Pembulatan Gaji PNS | 14,964 | 0 |
| 3.0 | 511121 | Beban Tunj. Suami/Istri PNS | 79,781,360 | 0 |
| 3.0 | 511122 | Beban Tunj. Anak PNS | 26,717,016 | 0 |
| 3.0 | 511123 | Beban Tunj. Struktural PNS | 12,600,000 | 0 |
| 3.0 | 511124 | Beban Tunj. Fungsional PNS | 65,405,000 | 0 |
| 3.0 | 511125 | Beban Tunj. PPh PNS | 13,918,024 | 0 |
| 3.0 | 511126 | Beban Tunj. Beras PNS | 62,570,880 | 0 |
| 3.0 | 511129 | Beban Uang Makan PNS | 142,938,000 | 0 |
| 3.0 | 511151 | Beban Tunjangan Umum PNS | 6,985,000 | 0 |
| 3.0 | 511611 | Beban Gaji Pokok PPPK | 78,775,100 | 0 |
| 3.0 | 511619 | Beban Pembulatan Gaji PPPK | 1,411 | 0 |
| 3.0 | 511621 | Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK | 4,033,190 | 0 |
| 3.0 | 511622 | Beban Tunjangan Anak PPPK | 120,526 | 0 |
| 3.0 | 511624 | Beban Tunjangan Fungsional PPPK | 6,670,000 | 0 |
| 3.0 | 511625 | Beban Tunjangan Beras PPPK | 3,041,640 | 0 |
| 3.0 | 511628 | Beban Uang Makan PPPK | 13,089,000 | 0 |

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (649699) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG

Tgl Data : 16/01/25 12:53 PM

Tgl Cetak : 16/01/25 6:27 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN | DEBIT | KREDIT |
|---------------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.0 | 512211 | Beban Uang Lembur | 74,690,000 | 0 |
| 3.0 | 512212 | Beban Uang Lembur PPPK | 4,922,000 | 0 |
| 3.0 | 512411 | Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) | 1,363,821,971 | 0 |
| 3.0 | 512414 | Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK | 95,900,405 | 0 |
| 3.0 | 521111 | Beban Keperluan Perkantoran | 561,844,307 | 0 |
| 3.0 | 521113 | Beban Penambah Daya Tahan Tubuh | 47,520,000 | 0 |
| 3.0 | 521114 | Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 8,228,651 | 0 |
| 3.0 | 521115 | Beban Honor Operasional Satuan Kerja | 69,992,000 | 0 |
| 3.0 | 521119 | Beban Barang Operasional Lainnya | 35,062,900 | 0 |
| 3.0 | 521211 | Beban Bahan | 28,513,600 | 0 |
| 3.0 | 521213 | Beban Honor Output Kegiatan | 4,896,000 | 0 |
| 3.0 | 522111 | Beban Langganan Listrik | 220,089,600 | 0 |
| 3.0 | 522112 | Beban Langganan Telepon | 96,121 | 0 |
| 3.0 | 522141 | Beban Sewa | 43,665,000 | 0 |
| 3.0 | 522151 | Beban Jasa Profesi | 3,600,000 | 0 |
| 3.0 | 522191 | Beban Jasa Lainnya | 827,403,100 | 0 |
| 3.0 | 523111 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 179,104,306 | 0 |
| 3.0 | 523121 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 151,697,796 | 0 |
| 3.0 | 524111 | Beban Perjalanan Dinas Biasa | 369,915,576 | 0 |
| 3.0 | 524113 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17,510,000 | 0 |
| 3.0 | 524114 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 18,000,000 | 0 |
| 3.0 | 524119 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 20,955,175 | 0 |
| 3.0 | 591111 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 154,552,044 | 0 |
| 3.0 | 591211 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 96,983,857 | 0 |
| 3.0 | 591311 | Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan | 41,317,688 | 0 |
| 3.0 | 591312 | Beban Penyusutan Irigasi | 5,983,243 | 0 |
| 3.0 | 591313 | Beban Penyusutan Jaringan | 1,245,963 | 0 |
| 3.0 | 593111 | Beban Persediaan konsumsi | 124,934,108 | 0 |
| 3.0 | 593113 | Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan | 4,927,000 | 0 |
| JUMLAH | | | 25,391,293,507 | 25,391,293,507 |

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Pangkalpinang, 16 Januari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kasasa Pengguna Anggaran



DEDI ARIEF HENDRIYANTO, S.ST.PI, M.SI

NIP 197805252000031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (649699) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG

Tgl Data : 05/02/25 12:24 PM

Tgl Cetak : 05/02/25 1:44 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN | DEBET | KREDIT |
|----------|-----------|---|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0.0 | 313111 | DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN | 0 | 5,758,940,592 |
| 0.0 | 313121 | DITERIMA DARI ENTITAS LAIN | 354,355,000 | 0 |
| 3.0 | 425289 | Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya | 0 | 354,255,000 |
| 3.0 | 425332 | Pendapatan Jasa Karantina Perikanan | 0 | 100,000 |
| 3.0 | 511111 | Belanja Gaji Pokok PNS | 1,009,583,200 | 0 |
| 3.0 | 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 15,244 | 0 |
| 3.0 | 511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 79,781,360 | 0 |
| 3.0 | 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS | 26,717,016 | 0 |
| 3.0 | 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS | 12,600,000 | 0 |
| 3.0 | 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS | 65,405,000 | 0 |
| 3.0 | 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS | 13,918,024 | 0 |
| 3.0 | 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS | 62,570,880 | 0 |
| 3.0 | 511129 | Belanja Uang Makan PNS | 142,938,000 | 0 |
| 3.0 | 511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS | 6,985,000 | 0 |
| 3.0 | 511611 | Belanja Gaji Pokok PPPK | 78,775,100 | 0 |
| 3.0 | 511619 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 1,411 | 0 |
| 3.0 | 511621 | Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK | 4,033,190 | 0 |
| 3.0 | 511622 | Belanja Tunjangan Anak PPPK | 120,526 | 0 |
| 3.0 | 511624 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 6,670,000 | 0 |
| 3.0 | 511625 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 3,041,640 | 0 |
| 3.0 | 511628 | Belanja Uang Makan PPPK | 13,089,000 | 0 |
| 3.0 | 512211 | Belanja Uang Lembur | 74,690,000 | 0 |
| 3.0 | 512212 | Belanja Uang Lembur PPPK | 4,922,000 | 0 |
| 3.0 | 512411 | Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) | 1,363,821,971 | 0 |
| 3.0 | 512414 | Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK | 95,900,405 | 0 |
| 3.0 | 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 566,273,356 | 0 |
| 3.0 | 521113 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 47,520,000 | 0 |
| 3.0 | 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 9,169,851 | 0 |
| 3.0 | 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | 69,992,000 | 0 |
| 3.0 | 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 35,062,900 | 0 |
| 3.0 | 521211 | Belanja Bahan | 28,513,600 | 0 |
| 3.0 | 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | 4,896,000 | 0 |
| 3.0 | 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 78,837,400 | 0 |
| 3.0 | 522111 | Belanja Langganan Listrik | 221,086,724 | 0 |
| 3.0 | 522112 | Belanja Langganan Telepon | 159,121 | 0 |
| 3.0 | 522141 | Belanja Sewa | 43,665,000 | 0 |
| 3.0 | 522151 | Belanja Jasa Profesi | 3,600,000 | 0 |
| 3.0 | 522191 | Belanja Jasa Lainnya | 827,403,100 | 0 |

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (649699) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG

Tgl Data : 05/02/25 12:24 PM

Tgl Cetak : 05/02/25 1:44 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN | DEBIT | KREDIT |
|----------|-----------|---|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.0 | 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 179,104,306 | 0 |
| 3.0 | 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 151,697,796 | 0 |
| 3.0 | 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 369,915,576 | 0 |
| 3.0 | 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17,510,000 | 0 |
| 3.0 | 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 18,000,000 | 0 |
| 3.0 | 524119 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 20,955,175 | 0 |
| 3.1 | 511119 | Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS | 0 | 280 |
| JUMLAH | | | 6,113,295,872 | 6,113,295,872 |

Keterangan :

FINAL

Pangkalpinang, 5 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



DEDY ARIEF HENDRIYANTO, S.ST.PI, M.SI

197805252000031002

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (649699) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG

Tgl Data : 16/01/25 12:53 PM

Tgl Cetak : 16/01/25 7:08 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

| URAIAN | 2024 | 2023 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|---|---------------|---------------|------------------------|----------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| PENDAPATAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| PENDAPATAN PERPAJAKAN | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Penghasilan | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Cukai | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bea Masuk | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bea Keluar | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pendapatan Perpajakan | 0 | 0 | 0 | |
| PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Sumber Daya Alam | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND) | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | 354,355,000 | 591,615,000 | (237,260,000) | (40.104) |
| Pendapatan Badan Layanan Umum | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak | 354,355,000 | 591,615,000 | (237,260,000) | (40.104) |
| PENDAPATAN HIBAH | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pendapatan | (354,355,000) | (591,615,000) | 237,260,000 | (40.104) |
| BEBAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Pegawai | 3,065,578,687 | 3,617,377,608 | (551,798,921) | (15.254) |
| Beban Persediaan | 124,934,108 | 319,782,509 | (194,848,401) | (60.932) |
| Beban Barang dan Jasa | 1,850,911,279 | 2,087,584,304 | (236,673,025) | (11.337) |
| Beban Pemeliharaan | 335,729,102 | 380,238,299 | (44,509,197) | (11.706) |
| Beban Perjalanan Dinas | 426,380,751 | 615,406,606 | (189,025,855) | (30.716) |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda | 0 | 0 | 0 | |

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (649699) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG

Tgl Data : 16/01/25 12:53 PM

Tgl Cetak : 16/01/25 7:08 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

| URAIAN | 2024 | 2023 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|----------|
| Beban Pembayaran Bunga Utang | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Subsidi | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Hibah | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 300,082,795 | 679,512,653 | (379,429,858) | (55.839) |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Transfer ke Daerah | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH BEBAN | (6,103,616,722) | (7,699,901,979) | 1,596,285,257 | (20.731) |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL | 5,749,261,722 | 7,108,286,979 | (1,359,025,257) | (19.119) |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset | 0 | 9,667,853 | (9,667,853) | (100) |
| Pendapatan Pelepasan Aset | 0 | (11,587,000) | 11,587,000 | (100) |
| Beban Pelepasan Aset | 0 | (1,919,147) | 1,919,147 | (100) |
| Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | 0 | 9,667,853 | (9,667,853) | (100) |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | 5,749,261,722 | 7,098,619,126 | (1,349,357,404) | (19.009) |
| POS LUAR BIASA | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Luar Biasa | 0 | 0 | 0 | |
| POS LUAR BIASA | 0 | 0 | 0 | |
| SURPLUS/DEFISIT - LO | 5,749,261,722 | 7,098,619,126 | (1,349,357,404) | (19.009) |

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Pangkalpinang, 16 Januari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kelasa Pengguna Anggaran



DEDY ARIF HENDRIYANTO, S.ST.PI, M.SI
NIP 197805252000031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (649699) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG

Tgl Data : 16/01/25 12:43 PM

Tgl Cetak : 16/01/25 6:42 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

| URAIAN | 2024 | 2023 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------|
| EKUITAS AWAL | 12,635,457,565 | 12,975,847,174 | (340,389,609) | (2.62) |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | (5,749,261,722) | (7,098,619,126) | 1,349,357,404 | (19.01) |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENYESUAIAN NILAI ASET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELISIH REVALUASI ASET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | (433,403,149) | 6,758,229,517 | (7,191,632,666) | (106.41) |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | (6,182,664,871) | (340,389,609) | (5,842,275,262) | 1,716.35 |
| EKUITAS AKHIR | 6,452,792,694 | 12,635,457,565 | (6,182,664,871) | (48.93) |

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Pangkalpinang, 16 Januari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kada Pengguna Anggaran



DEDARIEF HENDRIYANTO, S.ST.PI, M.SI

NIP.197805252000031002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032

ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13

SATUAN KERJA : STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG 649699

Tgl Data : 16/01/25 12:53 PM

Tgl Cetak : 16/01/25 6:37 PM

Halaman : 2

lap_lra_face_satker_new_poc

| URAIAN | 2024 | | | | 2023 | | | |
|---|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|
| | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | % | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. Dana Alokasi Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dana Transfer Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Dana Alokasi Khusus Fisik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Hibah Kepada Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Dana Otonomi Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Dana Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Insentif Fiskal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II) | 5,836,936,000 | 5,758,940,592 | (77,995,408) | 99 | 7,583,515,000 | 7,340,859,767 | 242,655,233 | 97 |
| C. PEMBIAYAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE



Pangkalpinang, 16 Januari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DEPARIF HENDRIYANTO, S.ST.PI, M.SI

NIP 197805252000031002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 649699
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BANGKA BELITUNG
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 16/01/25 8:28 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 16/1/25 2:47 PM

| KODE | URAIAN | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA | | | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | BELANJA | PENGEMBALIAN BELANJA | BELANJA NETTO | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8=5/4 | 9=4-7 |
| 51 | BELANJA PEGAWAI | | | | | | | |
| 5111 | Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | | | | | | | |
| 511111 | Belanja Gaji Pokok PNS | 1,365,568,000 | 1,009,584,000 | 1,009,583,200 | 0 | 1,009,583,200 | 100 | 800 |
| 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 30,000 | 20,000 | 15,244 | 280 | 14,964 | 76.22 | 5,036 |
| 511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 116,285,000 | 79,786,000 | 79,781,360 | 0 | 79,781,360 | 99.99 | 4,640 |
| 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS | 37,626,000 | 26,734,000 | 26,717,016 | 0 | 26,717,016 | 99.94 | 16,984 |
| 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS | 12,600,000 | 12,600,000 | 12,600,000 | 0 | 12,600,000 | 100 | 0 |
| 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS | 99,675,000 | 65,405,000 | 65,405,000 | 0 | 65,405,000 | 100 | 0 |
| 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS | 4,071,000 | 14,069,000 | 13,918,024 | 0 | 13,918,024 | 98.93 | 150,976 |
| 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS | 88,424,000 | 62,573,000 | 62,570,880 | 0 | 62,570,880 | 100 | 2,120 |
| 511129 | Belanja Uang Makan PNS | 276,216,000 | 143,000,000 | 142,938,000 | 0 | 142,938,000 | 99.96 | 62,000 |
| 511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS | 22,012,000 | 6,985,000 | 6,985,000 | 0 | 6,985,000 | 100 | 0 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 | 2,022,507,000 | 1,420,756,000 | 1,420,513,724 | 280 | 1,420,513,444 | 99.98 | 242,556 |
| 5116 | Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK | | | | | | | |
| 511611 | Belanja Gaji Pokok PPPK | 38,934,000 | 78,782,000 | 78,775,100 | 0 | 78,775,100 | 99.99 | 6,900 |
| 511619 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 1,000 | 3,000 | 1,411 | 0 | 1,411 | 47.03 | 1,589 |
| 511621 | Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK | 3,860,000 | 4,034,000 | 4,033,190 | 0 | 4,033,190 | 99.98 | 810 |
| 511622 | Belanja Tunjangan Anak PPPK | 715,000 | 125,000 | 120,526 | 0 | 120,526 | 96.42 | 4,474 |
| 511624 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 3,575,000 | 6,670,000 | 6,670,000 | 0 | 6,670,000 | 100 | 0 |
| 511625 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 2,825,000 | 3,042,000 | 3,041,640 | 0 | 3,041,640 | 99.99 | 360 |
| 511628 | Belanja Uang Makan PPPK | 8,954,000 | 14,310,000 | 13,089,000 | 0 | 13,089,000 | 91.47 | 1,221,000 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116 | 58,864,000 | 106,966,000 | 105,730,867 | 0 | 105,730,867 | 98.85 | 1,235,133 |
| 5122 | Belanja Lembur | | | | | | | |
| 512211 | Belanja Uang Lembur | 120,000,000 | 74,800,000 | 74,690,000 | 0 | 74,690,000 | 99.85 | 110,000 |
| 512212 | Belanja Uang Lembur PPPK | 6,000,000 | 5,000,000 | 4,922,000 | 0 | 4,922,000 | 98.44 | 78,000 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 | 126,000,000 | 79,800,000 | 79,612,000 | 0 | 79,612,000 | 99.76 | 188,000 |
| 5124 | Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito | | | | | | | |
| 512411 | Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) | 1,527,196,000 | 1,365,020,000 | 1,363,821,971 | 0 | 1,363,821,971 | 99.91 | 1,198,029 |
| 512414 | Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK | 50,545,000 | 95,962,000 | 95,900,405 | 0 | 95,900,405 | 99.94 | 61,595 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124 | 1,577,741,000 | 1,460,982,000 | 1,459,722,376 | 0 | 1,459,722,376 | 99.91 | 1,259,624 |
| | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 | 3,785,112,000 | 3,068,504,000 | 3,065,578,967 | 280 | 3,065,578,687 | 99.9 | 2,925,313 |
| 52 | BELANJA BARANG | | | | | | | |
| 5211 | Belanja Barang Operasional | | | | | | | |
| 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 687,192,000 | 567,794,000 | 566,273,356 | 0 | 566,273,356 | 99.73 | 1,520,644 |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 649699
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BANGKA BELITUNG
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 16/01/25 8:28 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 16/1/25 2:47 PM

| KODE | URAIAN | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA | | | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | BELANJA | PENGEMBALIAN BELANJA | BELANJA NETTO | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8=5/4 | 9=4-7 |
| 521113 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 114,048,000 | 47,520,000 | 47,520,000 | 0 | 47,520,000 | 100 | 0 |
| 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 12,000,000 | 9,900,000 | 9,169,851 | 0 | 9,169,851 | 92.62 | 730,149 |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | 123,360,000 | 70,020,000 | 69,992,000 | 0 | 69,992,000 | 99.96 | 28,000 |
| 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 70,180,000 | 35,908,000 | 35,062,900 | 0 | 35,062,900 | 97.65 | 845,100 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 | 1,006,780,000 | 731,142,000 | 728,018,107 | 0 | 728,018,107 | 99.57 | 3,123,893 |
| 5212 | Belanja Barang Non Operasional | | | | | | | |
| 521211 | Belanja Bahan | 33,131,000 | 43,418,000 | 28,513,600 | 0 | 28,513,600 | 65.67 | 14,904,400 |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | 8,160,000 | 4,896,000 | 4,896,000 | 0 | 4,896,000 | 100 | 0 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 | 41,291,000 | 48,314,000 | 33,409,600 | 0 | 33,409,600 | 69.15 | 14,904,400 |
| 5218 | Belanja Barang Persediaan | | | | | | | |
| 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 128,930,000 | 78,960,000 | 78,837,400 | 0 | 78,837,400 | 99.84 | 122,600 |
| 521821 | Belanja Barang Persediaan bahan baku | 145,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 | 273,930,000 | 78,960,000 | 78,837,400 | 0 | 78,837,400 | 99.84 | 122,600 |
| 5221 | Belanja Jasa | | | | | | | |
| 522111 | Belanja Langganan Listrik | 240,000,000 | 222,516,000 | 221,086,724 | 0 | 221,086,724 | 99.36 | 1,429,276 |
| 522112 | Belanja Langganan Telepon | 6,000,000 | 300,000 | 159,121 | 0 | 159,121 | 53.04 | 140,879 |
| 522141 | Belanja Sewa | 80,000,000 | 43,700,000 | 43,665,000 | 0 | 43,665,000 | 99.92 | 35,000 |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | 3,750,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 100 | 0 |
| 522191 | Belanja Jasa Lainnya | 735,520,000 | 827,600,000 | 827,403,100 | 0 | 827,403,100 | 99.98 | 196,900 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 | 1,065,270,000 | 1,097,716,000 | 1,095,913,945 | 0 | 1,095,913,945 | 99.84 | 1,802,055 |
| 5231 | Belanja Pemeliharaan | | | | | | | |
| 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 209,650,000 | 179,500,000 | 179,104,306 | 0 | 179,104,306 | 99.78 | 395,694 |
| 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 189,720,000 | 154,615,000 | 151,697,796 | 0 | 151,697,796 | 98.11 | 2,917,204 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 | 399,370,000 | 334,115,000 | 330,802,102 | 0 | 330,802,102 | 99.01 | 3,312,898 |
| 5241 | Belanja Perjalanan Dalam Negeri | | | | | | | |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 525,137,000 | 419,855,000 | 369,915,576 | 0 | 369,915,576 | 88.11 | 49,939,424 |
| 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 74,230,000 | 18,330,000 | 17,510,000 | 0 | 17,510,000 | 95.53 | 820,000 |
| 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 100 | 0 |
| 524119 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 0 | 22,000,000 | 20,955,175 | 0 | 20,955,175 | 95.25 | 1,044,825 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 | 599,367,000 | 478,185,000 | 426,380,751 | 0 | 426,380,751 | 89.17 | 51,804,249 |
| | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 | 3,386,008,000 | 2,768,432,000 | 2,693,361,905 | 0 | 2,693,361,905 | 97.29 | 75,070,095 |
| | JUMLAH BELANJA | 7,171,120,000 | 5,836,936,000 | 5,758,940,872 | 280 | 5,758,940,592 | 98.66 | 77,995,408 |